

Analisis Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang

Muhamad Mukhlis

STIE Jayanegara Tamansiswa Malang

E-mail: m_mukhlis@stiekn.ac.id

Article History:

Received: 05 Oktober 2023

Revised: 23 Oktober 2023

Accepted: 25 Oktober 2023

Keywords: *Regional Tax;
Locally-Generated Revenue;
Economic Growth.*

Abstract: *This study investigates the influence of regional taxes and levies on economic growth, with locally-generated revenue serving as a mediating variable in Malang Regency from 2018 to 2023. The research follows a quantitative design, utilizing secondary data obtained through documentation. A saturated sampling technique was applied to select the sample, and the data was processed using SmartPLS 3.0. The findings reveal that regional taxes and levies do not directly impact economic growth. However, both taxes and levies play a significant role in increasing locally-generated revenue, which, in turn, enhances economic growth. Nevertheless, locally-generated revenue does not mediate the effect of regional taxes and levies on economic growth.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam tersebut dapat dipergunakan dengan baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya (Fitri & Hama, 2022). Pembangunan ekonomi merata dan berkelanjutan adalah strategi yang dapat dilakukan untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat Indonesia (Hama, 2023). Menurut (Putri & Rizal, 2022) pembangunan ekonomi adalah suatu kenaikan pendapatan total dalam struktur ekonomi suatu negara dalam jangka waktu yang panjang. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi (Idham, Walewangko, & Siwu, 2021).

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Mononimbar, Lopian, & Tolosang, 2022). Sedangkan Hasyim, (2019) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian dalam bentuk barang atau jasa yang diproduksi oleh masyarakat meningkat yang dapat menyebabkan perubahan kondisi perekonomian suatu negara menuju kondisi yang lebih baik (Rifai & Priono, 2022).

Tolak ukur ketercapaian ekonomi daerah dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah

secara riil ditiap tahunnya, dapat diukur dengan besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan (Maodi & Desmintari, 2023). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai tambah (produk) yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/ lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah (*region*) tertentu tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksi (BPS Kab. Malang, 2018).

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malang Tahun 2018-2023

Tahun	PDRB ADHK (Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2018	118.179.189,88	5,51
2019	125.039.056,37	5,80
2020	132.552.943,04	6,02
2021	140.492.937,79	5,99
2022	135.305.323,11	-3,69
2023	141.000.359,48	4,22

Sumber: BPS Kabupaten Malang, Data Diolah (2023)

Tabel 1. diatas menunjukkan data pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan milik Kabupaten Malang tahun 2018-2023. Pada tahun 2018 hingga tahun 2021 persentase pertumbuhan ekonomi selalu positif, dimana dapat dikatakan bahwa persentase pertumbuhan ekonomi telah mencapai target yang telah ditentukan. Namun pada tahun 2022 persentase realisasi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang signifikan hanya sebesar 3,69%, kurang dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 5,75%. Masa pandemi covid-19 terjadi kontraksi pertumbuhan hampir disebagian besar kategori lapangan usaha. Penurunan pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di beberapa lapangan usaha dan adanya deflasi (Berita Resmi Statistik BPS Kabupaten Malang, 2022). Pada tahun 2023 keadaan ekonomi kabupaten Malang perlahan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, ditandai dengan naiknya realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,22%.

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi membuat pemerintah daerah di Indonesia memiliki kesempatan dan keleluasaan dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya (Rosi, 2022). Dengan diterapkannya otonomi daerah, setiap pemerintah daerah memiliki kekuasaan dan keleluasaan dalam mengatur dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan milik pemerintah daerah di Indonesia yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Salah satu unsur dalam APBD yaitu anggaran pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Manalu, Prayogi, & Lubis, 2023). Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan asli daerah dapat diperoleh dari pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Objek retribusi dibagi menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Malang

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2018	686.820.000,00	735.767.535,18	110,94
2019	831.150.000,00	925.569.237,85	111,36
2020	904.540.000,00	961.840.717,56	106,33
2021	1.009.946.880,00	1.032.160.117,01	102,20
2022	849.455.000,00	929.261.529,99	109,40
2023	962.962.000,00	1.027.822.704,72	106,74

Sumber: Pemkab. Malang, Data diolah (2023)

Tabel 2 diatas menunjukkan target dan realisasi penerimaan pajak daerah milik Kabupaten Malang tahun 2018-2023. Dalam rentang 6 tahun mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2023 penerimaan target pajak daerah kabupaten Malang selalu mencapai target yang telah ditentukan. Meskipun penerimaan pajak di Kabupaten Malang selalu melampaui target yang telah ditentukan akan tetapi pada kenyataannya dengan adanya pandemi covid-19 menyebabkan pelemahan ekonomi secara substansial. Di Kabupaten Malang kondisi ini menimbulkan perlambatan terhadap penerimaan pajak daerah. Target penerimaan pajak daerah di Kabupaten Malang pada tahun 2022 pada awalnya sebesar Rp 1.097 triliun, namun karena adanya pandemi covid-19 untuk mencapai target yang telah ditentukan cukup sulit. Oleh karena itu target diturunkan sebesar Rp 248 miliar, sehingga target penerimaan terkoreksi menjadi Rp 849 miliar (Supriyatno, 2022b).

Dengan adanya PAD khususnya dari sektor Pajak Daerah maka perekonomian dan pembangunan di suatu daerah akan berjalan dengan lancar serta dapat mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu daerah, selain penerimaan pemerintah daerah mengalami peningkatan pendapatan masyarakat juga tinggi yang akan menyebabkan makin meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi (Lianda, Priantana, & Aswadi, 2021). Hal ini didukung oleh penelitian (Idham et al., 2021) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mononimbar et al., 2022) yang menyatakan bahwa pajak daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018-2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2018	102.863.202,18	106.606.736,35	103,64
2019	82.402.295,54	80.087.712,76	97,19
2020	85.607.177,50	93.100.506,08	108,75
2021	65.940.720,75	72.709.215,82	110,26
2022	55.980.517,53	58.931.135,49	105,27
2023	71.797.328.070,00	65.341.926,57	91,01

Sumber: Pemkab. Malang, Data Diolah (2023)

Tabel 3 diatas menunjukkan target dan realisasi retribusi daerah milik Kabupaten Malang tahun 2018-2023 menggambarkan keadaan yang mengalami fluktuatif dan cenderung berubah-ubah setiap tahunnya. Pada tahun 2019 dan tahun 2023 penerimaan retribusi daerah tidak mencapai target yang telah ditentukan, yakni hanya sebesar 97,19% dan 91,01% saja. Persentase penerimaan terbesar terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah persentase sebesar 110,26%, dan yang terkecil terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah persentase sebesar 91,01%.

Selain pajak, retribusi daerah juga berpengaruh terhadap kemandirian daerah serta berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Retribusi inilah yang menjadi bentuk kontribusi langsung rakyat daerah untuk mendukung proses perekonomian yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah (Maodi & Desmintari, 2022). Hal ini didukung oleh penelitian dari (Budi, 2021) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Budhi, 2018) yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab Malang

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2018	1.203.799.439,00	1.335.470.792,17	110,94
2019	1.557.772.194,42	1.671.485.430,55	107,30
2020	1.493.647.141,17	1.700.795.833,71	113,87
2021	1.708.311.077,85	1.689.953.713,26	98,93
2022	1.531.360.832,03	1.798.515.529,27	117,45
2023	1.714.484.423,35	1.928.091.787,36	112,46

Sumber: Pemkab. Malang, Data Diolah (2023)

Tabel 4 diatas menunjukkan data penerimaan pendapatan asli daerah milik Kabupaten Malang pada tahun 2018-2023 yang telah mencapai target yang telah ditentukan. Hanya pada tahun 2021 penerimaan pendapatan asli daerah tidak mencapai target yang telah ditentukan, dengan jumlah persentase penerimaan hanya sebesar 98,93% saja. Persentase penerimaan tersebsar terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah persentase sebesar 117,45%. Dan persentase penerimaan terkecil terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah persentase sebesar 98,93%.

Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, dimana setiap peningkatan pajak daerah akan mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah. Dengan demikian, adanya hubungan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu jika jumlah penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan maka pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan (Usman, 2017). Hal ini didukung penelitian (Haqiqi, 2020), (Meinanda & Larasati, 2021) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jebarut, 2021) menyatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut (Sudarmana & Sudiarta, 2020). Hal ini didukung oleh penelitian dari Ramadhan (2021) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Meinanda & Larasati, 2021) menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonomi positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Rori et al., 2018). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Yasin, 2020) serta Lily Kusumawati dan I Gusti Bagus Wiksuana (2020) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Megasari, 2020) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, karena hasil yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya masih terdapat perbedaan hasil. Dalam penelitian ini peneliti menambahkan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening karena diharapkan variabel pendapatan asli daerah dapat memediasi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk numerik/angka. Pada dasarnya, pendekatan ini menggambarkan data melalui angka-angka, seperti persentase tingkat

pengangguran, kemiskinan, data rasio keuangan, dan lain sebagainya. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki oleh peneliti (Suryani dan Hendryadi, 2015:109).

Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas, satu variabel terikat, dan satu variabel intervening. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pajak daerah (X1), dan retribusi daerah (X2). Untuk variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (Y). Dan untuk variabel intervening dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (Z).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. (Sugiyono, 2015:85).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode smart PLS (Partial Least Square). PLS adalah analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran diunakan untuk uji validitas dan realibilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi) (Abdillah & Hartono, 2015:164).

Menurut Abdillah dan Hartono (2015:92) pengujian hipotesis adalah proses pengambilan keputusan dimana peneliti mengevaluasi hasil penelitian terhadap apa yang ingin dicapai sebelumnya. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan melihat nilai *p-value*. Uji hipotesis digunakan untuk mengarahkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Nilai probabilitas memiliki kriteria yang ditetapkan yaitu nilai *p-value* dengan alpha 5% adalah kurang dari 0,05. Jika $p\text{-value} < 0,05$ maka hipotesis dinyatakan signifikan dan apabila $p\text{-value} > 0,05$ maka hipotesis dinyatakan tidak signifikan.

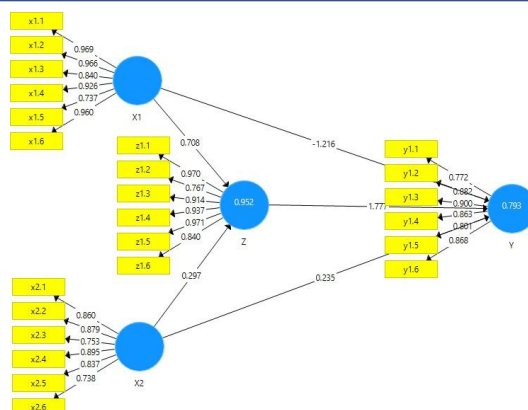
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Measurement (Outer) Model

Uji kualitas data dilakukan dengan cara uji validitas dan realibilitas. Pengujian data pada outer model yaitu *convergent validity*, *discriminant validity*, *composite realibility*, dan *cronbach alpha*.

1. Convergent Validity

Menurut Abdillah & Hartono (2015:195) suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai *loading factor* diatas 0,5. Untuk menguji *convergent validity* digunakan nilai *outer loading* atau *loading factor*. Suatu indikator dinyatakan memenuhi *convergent validity* dalam kategori baik apabila memiliki nilai *loading factor* $> 0,050$. Output SmartPLS untuk *loading factor* memberikan hasil sebagai berikut:



Gambar 1 Outer Loading

Tabel 5 Outer Loading

Variabel	Indikator	Original sample estimate	Keterangan
Pajak Daerah (X1)	X11	0,969	Valid
	X12	0,966	Valid
	X13	0,840	Valid
	X14	0,926	Valid
	X15	0,737	Valid
	X16	0,960	Valid
Retribusi Daerah (X2)	X21	0,860	Valid
	X22	0,879	Valid
	X23	0,753	Valid
	X24	0,895	Valid
	X25	0,837	Valid
	X26	0,738	Valid
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Y 11	0,772	Valid
	Y 12	0,882	Valid
	Y 13	0,900	Valid
	Y 14	0,863	Valid
	Y 15	0,801	Valid
	Y 16	0,868	Valid
Pendapatan Asli Daerah (Z)	Z11	0,970	Valid
	Z12	0,767	Valid
	Z13	0,914	Valid
	Z14	0,937	Valid
	Z15	0,971	Valid
	Z16	0,840	Valid

Sumber: Data primer, 2024 diolah PLS 3.0

Tabel diatas menunjukkan hasil pengujian bahwa nilai outer loading telah memenuhi nilai yang disarankan yaitu sebesar $>0,50$ (Abdillah & Hartono, 2015:195). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid atau telah memenuhi convergent validity.

2. *Discriminant Validity*

Uji validitas diskriminan ditunjukkan oleh nilai *cross loadings*. Indikator dapat dinyatakan *discriminant validity* apabila nilai *cross loading* pada variabel memiliki nilai terbesar daripada variabel lainnya. Hasil *discriminant validity* ditunjukkan pada tabel dibawahini.

Tabel 6 Cross Loading

	Pajak Daerah (X1)	Retribusi Daerah (X2)	Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Pendapatan Asli Daerah (Z)
X11	0,969	0,836	0,690	0,958
X12	0,966	0,815	0,708	0,963
X13	0,840	0,697	0,432	0,727
X14	0,926	0,909	0,724	0,923
X15	0,737	0,462	0,485	0,644
X16	0,960	0,873	0,685	0,943
X21	0,702	0,860	0,732	0,743
X22	0,828	0,879	0,867	0,872
X23	0,682	0,753	0,367	0,615
X24	0,739	0,895	0,688	0,775
X25	0,685	0,837	0,679	0,777
X26	0,638	0,738	0,516	0,687
Y 11	0,562	0,607	0,772	0,605
Y 12	0,474	0,547	0,882	0,650
Y 13	0,630	0,783	0,900	0,771
Y 14	0,587	0,734	0,863	0,714
Y 15	0,750	0,693	0,801	0,762
Y 16	0,589	0,700	0,868	0,663
Z11	0,946	0,938	0,731	0,970
Z12	0,727	0,705	0,702	0,767
Z13	0,896	0,883	0,691	0,914
Z14	0,913	0,845	0,737	0,937
Z15	0,948	0,863	0,784	0,971
Z16	0,767	0,656	0,793	0,840

Sumber: Data primer, 2023 diolah SmartPLS 3.0

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *cross loadings* masing-masing indikator pada variabel penelitian memiliki nilai *cross loadings* terbesar pada variabel yang dibentuknya dibandingkan dengan nilai *cross loadings* pada variabel lainnya. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki *discriminant validity* yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing.

Berdasarkan nilai *cross loadings* diatas, dapat diketahui bahwa semua indikator yang membentuk variabel pajak daerah, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan asli daerah telah memenuhi *discriminant validity* karena memiliki nilai *cross loading* terbesar untuk variabel yang dibentuknya dan tidak pada variabel lain. dengan demikian, semua indikator variabel pajak daerah, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan asli daerah telah memenuhi *discriminant validity*.

Selain dilihat dari *cross loadings*, *discriminant validity* juga dapat diketahui melalui metode lainnya yaitu dengan melihat AVE yang bertujuan untuk menguji realibilitas konstruk. AVE bertujuan untuk menetapkan bahwa variabel konstruk memiliki nilai *discriminant validity* yang baik. Nilai AVE dinyatakan memuaskan jika $>0,5$. Berikut merupakan hasil uji AVE:

Tabel 7 Nilai AVE

Variabel	AVE
Pajak Daerah (X1)	0,817
Retribusi Daerah (X2)	0,688
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	0,721
Pendapatan Asli Daerah (Z)	0,815

Sumber: Data Primer, dioalh SmartPLS 3.0

Hasil nilai AVE untuk blok indikator yang mengukur konstruk dapat dinyatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik, karena nilai AVE $>0,5$. Hal dapat dikatakan bahwa semua variabel konstruk dinyatakan telah memiliki *discriminant validity* yang baik.

3. Composite Realibility

Composite realibility merupakan bagian yang digunakan untuk menguji nilai reabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu variabel dapat dikatakan memenuhi composite realibility apabila memiliki nilai *composite realibility* $>0,70$. Berikut merupakan nilai *composite realibility* dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 8 Composite Reability

Variabel	Composite Realibility
Pajak Daerah (X1)	0,964
Retribusi Daerah (X2)	0,929
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	0,939
Pendapatan Asli Daerah (Z)	0,963

Sumber: Data primer, 2023 dioalh SmartPLS 3.0

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai *composite realibility* semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini $>0,70$. Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi *composite realibility* sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memadai dalam mengukur variabel laten/konstruk yang diukur sehingga dapat digunakan dalam analisis tahap selanjutnya.

4. Cronbach Alpha

Uji realibilitas dengan *composite realibility* diatas dapat diperkuat dengan menggunakan nilai *cronbach alpha*. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel atau memenuhi *cronbach alpha* $>0,6$. Berikut merupakan nilai *cronbach alpha* dari masing-masing variabel:

Tabel 9 Cronbach Alpha

Variabel	Cronbach Alpha
Pajak Daerah (X1)	0,954
Retribusi Daerah (X2)	0,909
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	0,922
Pendapatan Asli Daerah (Z)	0,953

Sumber: Data primer, 2023 diolah SmartPLS 3.0

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai *cronbach alpha* dari masing-masing variabel penelitian adalah $>0,60$. Dengan demikian hasil ini dapat menunjukkan bahwa masing-masing variabel penelitian telah memenuhi persyaratan nilai *cronbach alpha*, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

Uji Inner Model

Menilai model PLS dimulai dengan melihat dari R-Square untuk setiap variabel laten dependen. Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel lain endogen apakah mempunyai pengaruh yang *substantive*. Nilai *R-Square* 0,75, 0,50 dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate dan lemah. Hasil dari *R-Square* merepresentasikan jumlah varian dari konstruk yang dijelaskan oleh model (Ghozali & Latan 2015:78). Adapun output PLS sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 10 R-Square

Variabel	R-Square
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	0,793

Sumber: Data primer, 2024 dioalh SmartPLS 3.0

Berdasarkan hasil pengujian nilai R-Square diatas maka dapat diinterpretasikan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam model strukturan memiliki nilai R^2 sebesar 0.788 yang

mengindikasikan bahwa model “kuat”. Dengan demikian bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 78,8%, sedangkan sisanya sebesar 21,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengujian model struktural (inner model) dengan melihat R- Square yang merupakan uji *goodness-fit model*. Selain itu juga dengan melihat path coefficients yang menunjukkan koefisien parameter dan nilai signifikansi t-statistik. Signifikansi parameter yang diestimasi dapat memberikan informasi mengenai hubungan antar variabel-variabel penelitian. Batas untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan adalah ketika nilai p-value < 0,05 maka hipotesis dinyatakan signifikan dan apabila p-value > 0,05 maka hipotesis dinyatakan tidak signifikan. Tabel dibawah ini menyajikan output estimasi untuk pengujian model struktural.

Tabel 11. Uji Hipotesis berdasarkan Path Coefficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STERR)	P - Values	Note
X1 -> Y	-1,216	-1,336	0,711	1,710	0,088	Nonsignifikan
X2 -> Y	0,235	0,382	0,563	0,418	0,676	Nonsignifikan
X1 -> Z	0,708	0,694	0,148	4,778	0,000	Signifikan
X2 -> Z	0,297	0,313	0,151	1,966	0,050	Signifikan
Z -> Y	1,777	1,733	0,855	2,077	0,038	Signifikan
X1 -> Z -> Y	1,258	1,214	0,680	1,849	0,065	Nonsignifikan
X2 -> Z -> Y	0,528	0,532	0,359	1,471	0,142	Nonsignifikan

Tabel diatas menunjukkan hasil pengujian bootstrapping terhadap sampel. *Bootstrapping* adalah suatu prosedur non-parametrik yang memungkinkan pengujian signifikansi statistik dari berbagai hasil PLS-SEM seperti koefisien jalur, Cronbach's alpha, HTMT dan nilai R². Pengujian dengan bootstrapping juga dimaksudkan meminimalkan masalah ketidaknormalan data penelitian. Hasil pengujian dengan bootstrapping dari analisis PLS adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari nilai koefisien parameter nilai T-Statistic sebesar 1.710 dan nilai P- Values sebesar 0,088. Syarat diterima yaitu T-Statistic lebih dari (>1,96) dan P-Values kurang dari (< 0,05). Dengan demikian H1 dinyatakan ditolak, bahwa pajak daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Hipotesis kedua menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari nilai koefisien parameter nilai T-Statistic sebesar 0.418 dan nilai P-Values sebesar 0,676. Syarat diterima yaitu T-Statistic lebih dari (> 1,96) dan P-Values kurang dari (< 0,05). Dengan demikian H2 dinyatakan ditolak, bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dilihat dari nilai koefisien parameter nilai T-Statistic sebesar 4.778 dan nilai P-Values sebesar 0,000. Syarat diterima yaitu T-Statistic lebih dari ($> 1,96$) dan P-Values kurang dari ($< 0,05$). Dengan demikian H3 dinyatakan diterima, bahwa pajak daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
4. Hipotesis keempat menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dilihat dari nilai koefisien parameter nilai T-Statistic sebesar 1.966 dan nilai P-Values sebesar 0,050. Syarat diterima yaitu T-Statistic lebih dari ($> 1,96$) dan P-Values kurang dari ($< 0,05$). Dengan demikian H4 dinyatakan diterima, bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
5. Hipotesis kelima menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari nilai koefisien parameter nilai T-Statistic sebesar 2.077 dan nilai P-Values sebesar 0,038. Syarat diterima yaitu T-Statistic lebih dari ($> 1,96$) dan P-Values kurang dari ($< 0,05$). Dengan demikian H5 dinyatakan diterima, bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
6. Hipotesis keenam menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah. Dilihat dari nilai koefisien parameter nilai T-Statistic sebesar 1.849 dan nilai P-Values sebesar 0,065. Syarat diterima yaitu T-Statistic lebih dari ($> 1,96$) dan P-Values kurang dari ($< 0,05$). Dengan demikian H6 dinyatakan ditolak, bahwa pajak daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah.
7. Hipotesis ketujuh menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah. Dilihat dari nilai koefisien parameter nilai T-Statistic sebesar 1.471 dan nilai P-Values sebesar 0,142. Syarat diterima yaitu T-Statistic lebih dari ($> 1,96$) dan P-Values kurang dari ($< 0,05$). Dengan demikian H7 dinyatakan ditolak, bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah tidak memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang tahun 2018-2023.
2. Retribusi daerah tidak memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang tahun 2018-2023.
3. Pajak daerah memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Malang tahun 2018-2023.
4. Retribusi daerah memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Malang tahun 2018-2023.
5. Pendapatan asli daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Malang tahun 2018-2023.

6. Pajak daerah tidak memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah di Kabupaten Malang tahun 2018-2023.
7. Retribusi daerah tidak memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah di Kabupaten Malang tahun 2018-2023.
8. Secara holistik pajak daerah dan retribusi daerah tidak memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang tahun 2018-2023.
9. Secara holistik pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Malang tahun 2018-2023.
10. Secara holistik pendapatan asli daerah tidak dapat memediasi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang tahun 2018-2023.

Saran

Adapun saran dari penelitian ini, guna untuk pengetahuan dan pengembangan dalam penelitian selanjutnya yaitu:

- a. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat menambah atau mengganti variabel-variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat menambahkan literasi pembahasan dan variasi topik penelitian kedepannya.
- b. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel yang akan digunakan sebagai penelitian sehingga dapat merepresentasikan pengaruh-pengaruh antar variabel yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, T. S. (2021). *Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi*. Ekonomi Pembangunan.
- Dewi, J. K., & Budhi, M. K. S. (2018). Analisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah terhadap tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(6), 1695–1722.
- Fitri, M. F., & Hama, A. (2022). Policy Analysis Of Tax Amendment And Tax Knowledge On Taxpayer Compliance With Personal Persons At The Tax Service Office Pratama Gresik. *Jurnal Mantik*, 6(1), 899–904.
- Hama, A. (2023). Analisis Kesadaran Pajak dan Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi. *COMSERVA*, 2(09), 1783–1794.
- Haqiqi, F. (2020). Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode 2016-2018. *Jurnal Cafetaria*, 1(1), 13–21.
- Hasyim, H. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan nilai tukar di Indonesia tahun 2006-2018. *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(2), 63–88.
- Idham, N., Walewangko, E. N., & Siwu, H. F. D. (2021). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tidore Kepulauan Dan Kota Ternate (2010-2019). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3).
- Jebarut, M. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(8), 548–560.
- Lianda, P. Y., Priantana, R. D., & Aswadi, K. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan

- Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 153–159.
- Manalu, S. P. R., Prayogi, O., & Lubis, H. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan Tahun 2013-2021. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 173–191.
- Maodi, L., & Desmintari, D. (2022). Pertumbuhan Perekonomian Pulau Jawa Tahun 2014-2019. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(01), 18–32.
- Megasari, M. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu Utara. *Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussiness*, 3(1).
- Meinanda, R. F., & Larasati, A. Y. (2021). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Studi Kasus Pada Bappenda Kota Cimahi, Tahun Anggaran 2015-2019). *Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 15(2), 536–551.
- Mononimbar, T. Y., Lopian, A. L. C. P., & Tolosang, K. D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(3).
- Putri, E. A., & Rizal, F. (2022). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Pada Masa Covid-19. *Journal Of Economics And Social Sciences (Jess)*, 1(2), 100–110.
- Rifai, A. D., & Priono, H. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 434–438.
- Rosi, A. I. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD Terhadap pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kerinci. *Agregate*, 5(2), 63–71.
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338.
- Usman, R. (2017). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 1(01), 87–103.
- Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 465–472.